



BNNP SUMBAR

RENCANA KERJA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Eda atas selesainya penyusunan Rencana Kerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target Indikator Kinerja Tahun 2024

Rencana Kerja disusun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Rencana Strategi BNN RI 2020-2024. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian visi misi BNN RI.

Padang, Februari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Barat



Tri Julianto Djatiutomo, S.I.K.,M.M

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM PERMASALAHAN NARKOBA

Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Dimana setiap Kementerian Lembaga dan satuan kerja mandiri wajib menjabarkan dan mengoperasikan rencana strategisnya selama setahun.

BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan BNN RI dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. rencana kerja ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana Pembangunan jangka menengah. Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan karena menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, dan harmonisasi Renporja ke dalam langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur.

Berdasarkan survey yang dilakukan BNN bersama BRIN tahun 2023, angka prevalensi di Indonesia mengalami penurunan dari 1,95 % tahun 2021 menjadi 1,73 % tahun 2023. prevalensi 1,73 artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia usia 15-64 tahun terdapat 173 orang terpapar narkoba dalam kurun 12 bulan terakhir atau setara dengan 3, 33 juta jiwa. Adapun jenis narkoba yang paling banyak dipakai yaitu Ganja dan Shabu.

Permasalahan narkoba yang semakin meningkat di Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan oleh banyak informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di daerah maupun di pedesaan yang merupakan akan menambah kawasan rawan narkoba di Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2023 BNN Provinsi Sumatera Barat berhasil mengumpulkan barang bukti

narkotika sebanyak ± 52.094,26 gr. Ini menunjukkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera Barat telah demikian hebatnya. Kondisi ini memerlukan kepedulian dari masyarakat dan pemulihan kawasan rawan narkoba.

Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 BNN Provinsi Sumatera Barat memperhatikan kondisi kerawanan narkoba di Provinsi Sumatera Barat, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, serta berbagai permasalahan terkini yang dihadapi BNN Provinsi Sumatera Barat dan jajaran.

B. KONDISI CAPAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2023

Penetapan Kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 menetapkan sebanyak 10 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja. Berikut evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat periode Tahun 2023. Berikut penjabaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi , target 4 kabupaten/kota tercapai 3 kabupaten/kota;
- Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi, target 4 kab/kota tercapai 4 kab/kota;
- Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi, target 4 kab/kota tercapai 4 kab/kota;
- Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi "waspada", target 1 kawasan tercapai 1 kawasan;
- Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi, target 2,6 Indeks tercapai 3, 55 Indeks.

Kegiatan Rehabilitasi terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- Persentase Penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup target 50 % tercapai 56 %;

- Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, target 50 orang tercapai 60 orang;
- Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis, target 2 orang tercapai 4 orang;
- Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi, target 2 lembaga tercapai 2 lembaga;
- Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 10 Unit tercapai 10 Unit;
- Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat, target 3,1 Indeks tercapai 3,40 Indeks.

Kegiatan Pemberantasan dan Intelijen terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 target 22 berkas perkara tercapai 32 berkas perkara.
- Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, target 100 tercapai 100.
- Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba, target 100 tercapai 100.

Kegiatan Umum terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat , target 83 % tercapai 94,19 %;
- Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target, target 4 kabupaten/kota , tercapai 2 kabupaten/kota dikarenakan ada output yang tidak tercapai;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat target 92 Indeks tercapai 96,93 Indeks;
- Jumlah BNN Kabupaten /Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target, target 4 kabupaten/kota tercapai 4 kabupaten/kota.
- Nilai Zona Integritas BNN PProvinsi Sumatera Barat Berdasarkan Penilaian Internal belum mencapai target, target 75 dan tercapai 71, 22.

Berikut tabel realisasi pencapaian sasaran kegiatan tahun 2023 :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	3 Kab/Kota	75 %
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota	4 Kab/Kota	100 %
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	4 Kab/kota	4 Kab/Kota	100 %
4.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	narkoba secara berkelanjutan	dari "Bahaya" menjadi "Waspada"			
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,60 Indeks	3,55 Indeks	136 %
5.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	50 %	56,25 %	112,5 %
6.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	50 Orang	60 Orang	120 %
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	2 Orang	4 Orang	200 %
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga	100 %
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	10 Unit	10 Unit	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
		yang operasional			
8.	Meningkatnya kualitas Layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,1 Indeks	3,40 Indeks	109 %
9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22 Berkas	41 Berkas	186 %
10.	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 %	100 %	100 %
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 %	100 %	100 %
11.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	83 %	94,19 %	113 %
		Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	4 Kabupaten/ Kota	2 Kab/Kota	50 %
12.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	96,93 indeks	105 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	sesuai prosedur	Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten/ kota	4 Kabupaten/ kota	100 %
13.	Meningkatnya Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	71,22 Indeks	94, 96 %

Terdapat 3 (tiga) target kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 yang tidak tercapai, namun ada juga beberapa yang melampaui target. Penentuan target kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 memperhatikan beberapa hal di antaranya :

- a. Capaian target kinerja terakhir yang dievaluasi (tahun 2023)
- b. Rencana Strategis BNN RI Tahun 2020-2024
- c. Dokumen Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024

C. IDENTIFIKASI POTENSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA

Pelaksanaan program P4GN di BNN Provinsi Sumatera Barat masih memiliki beberapa tantangan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia, baik di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota maupun SDM pendukung di stakeholder mitra kerja BNN di daerah masih kurang terlatih untuk beberapa layanan di daerah, terutama pada layanan rehabilitasi. Sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan program rehabilitasi.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, seperti kendaraan operasional, belum terpenuhinya sarana dan

prasarana gedung layanan rehabilitasi rawat inap serta fasilitas layanan rehabilitasi rawat jalan yang tersedia belum dapat dikatakan lengkap, juga fasilitas IT yang belum memadai terutama di Bidang Pemberantasan dan Intelijen.

3. Stigma negatif yang masih kental di masyarakat terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga mereka memiliki rasa malu dan takut untuk melaporkan diri secara sukarela serta kurangnya kesadaran orang tua pecandu (orang tua pecandu baru akan bertindak jika anaknya telah menunjukkan hal yang serius, misalnya telah mengalami gejala gangguan mental dan overdosis serta kriminal).
4. BNN Provinsi Sumatera Barat belum dapat melaksanakan program P4GN secara maksimal sampai ke seluruh pelosok Provinsi Sumatera Barat mengingat topografi wilayahnya yang sangat luas dan juga terdiri dari 1 (satu) kepulauan, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020 – 2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni :

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah mewujudkan manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proposional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini mempresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang professional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. TUJUAN ORGANISASI

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Sumatera Barat juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Sumatera Barat sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
2. Memperkuat kerja sama dengan stakeholder terkait P4GN
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi relawan narkoba, penggiat anti narkoba, Agen Pemulihan sebagai perpanjangan tangan BNN Provinsi Sumatera Barat
4. Pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai wadah pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba
5. Meningkatkan Informasi dan Layanan Publik
6. Menambahkan Jumlah Sumber Daya Manusia

Strategi BNN Provinsi Sumatera Barat telah diimplementasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

BNN Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pembangunan ketahanan diri remaja dan keluarga dengan melaksanakan kegiatan pencegahan berbasis keluarga dan penguatan karakter anti narkoba pada remaja. Berdasarkan pengukuran oleh BNN RI, nilai indeks ketahanan diri remaja anti narkoba (DEKTARI) Provinsi Sumatera Barat sebesar **48,41** dengan klasifikasi "**rendah**".

Pengukuran ketahanan keluarga anti narkoba (DEKTARA) mendapatkan nilai indeks sebesar **90,089** dengan klasifikasi "**sangat tinggi**". Hasil positif tersebut dapat terwujud berkat kerjasama berbagai instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. BNN Provinsi Sumatera Barat akan berupaya menduplikasi kegiatan serupa dengan mengajak stakeholder terkait, terutama pemerintah desa, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya desa (dana desa).

Pada tahun 2023, BNN Provinsi Sumatera Barat dan jajaran membentuk 10 desa bersinar yaitu : Kelurahan Indarung, Kec. Lubuk Kilangan, Nagari Buayan Lubuk Alung Kec. Batang Anai, Nagari Solok Laweh, Nagari Gaung, Desa Talawi Hilir, Desa Kolok Nan Tuo, Nagari Muaro Kiawai, Nagari Rabi Jonggor, Kel. Koto Panjang Dalam, Kel. Balai Tongah Koto.

BNN Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan berbagai upaya optimal guna menjadikan Kawasan Tanggap Ancaman Narkoba dan bersinergi dengan Desa Bersinar (bersih dari narkoba) dengan merangkul berbagai stakeholder terkait yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan bimbingan teknis lifeskill berupa pelatihan Pembuatan Papan Karang Bunga kepada kelompok masyarakat rawan narkoba di Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kota Payakumbuh terdiri dari 15 orang yang bertujuan memberikan kemampuan ekonomi masyarakat. Diharapkan dapat mencegah keterlibatan masyarakat dalam peredaran gelap narkoba karena alasan ekonomi.

Demi meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan P4GN. BNN Provinsi Sumatera Barat telah melatih 60 orang Penggiat yang berasal dari lingkungan

instansi pemerintah dan lingkungan pendidikan. BNN Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine narkoba sebanyak **2.987 sampel** di sepanjang tahun 2023.

2. Fungsi Rehabilitasi

Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN yang bertujuan untuk mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkoba dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Pada tahun 2023, BNNP Sumatera Barat telah melaksanakan :

- Layanan rehabilitasi Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat dan Jajaran sebanyak **213 orang** dengan layanan rehabilitasi rawat jalan.
- Lembaga Rehabilitasi yang telah diberikan penguatan SNI Layanan Rehabilitasi sebanyak **2 Lembaga**, yaitu di Yayasan Karunia Insani dan Klinik Intan Sari.
- Pelaksanaan Program Skrening Intervensi Lapangan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu dan memberi pemahaman kepada masyarakat yang masih khawatir terhadap stigma negatif mengenai program rehabilitasi dan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses layanan untuk mengikuti program rehabilitasi di BNNP Sumatera Barat dan jajaran. Selama tahun 2023 sebanyak **135 orang klien** yang telah di kunjungi oleh BNNP Sumatera Barat dan Jajaran.
- Pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), layanan IBM yang terbentuk di tahun 2023 berada di BNN Provinsi Sumatera Barat 2 Lokasi, BNNK Payakumbuh 2 Lokasi, BNNK Sawahlunto 2 Lokasi, BNNK Solok 2 Lokasi dan BNNK Pasaman Barat 2 Lokasi terdiri dari **50 orang** Agen Pemulihan (AP) dimana setiap 1 Lokasi IBM terdapat 5 Orang Agen Pemulihan. Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud adalah perorangan yang dilatih dan diberikan pembekalan teknis oleh BNN agar mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi kategori resiko rendah di daerah tersebut. Sebanyak **99 penyalahguna ringan** sudah melaksanakan rehabilitasi melalui program IBM.
- Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SHKPN) yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat dan jajaran sebanyak **1.602 Orang**, dengan rincian BNN Provinsi Sumatera Barat sebanyak **518 Orang**, BNN Kota Payakumbuh sebanyak **111 Orang**, BNN Kota Sawahlunto

Sebanyak **304 Orang**, BNN Kabupaten Solok sebanyak **164 Orang** dan BNN Kabupaten Pasaman Barat sebanyak **505 Orang**.

- Pelaksanaan layanan pascarehabilitasi untuk tahun 2023 adalah berupa Kajian Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi dengan menghasilkan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dari layanan rehabilitasi di klinik pratama BNN Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan hasil dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan rehabilitasi penyalahguna / pecandu narkoba di wilayah provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data survey dilaksanakan dari bulan juli – September 2023 kepada klien yang masih aktif menjalani rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama BNNP dan BNN Kab/Kota. Proses pengumpulan data dilaksanakan serentak di seluruh klinik pratama BNNP dan BNNK se Indonesia, dan di akomodir oleh Direktorat Pascarehab BNN bersama konsultan penelitian. BNNP Sumatera Barat dan jajaran memperoleh scoring **3,368 (dari skala 4) atau kategori Baik untuk unit pelayanan teknis dengan nilai B.**

3. Fungsi Pemberantasan dan Intelijen

Dalam rangka menekan *Supply Reduction*, BNNP Sumatera Barat dan jajaran bekerjasama dengan Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2023 telah berhasil mengungkap sebanyak 8 Laporan Kasus Narkotika dengan 16 Berkas Perkara dari 10 Target Berkas Perkara yang diberikan kepada BNNP Sumatera Barat, sedangkan sejumlah barang bukti yaitu narkotika jenis ganja dengan total sebesar 37.478,75 gram, Shabu seberat 2.100,14 gram dan 6.000 Butir Ekstasi yang disita dari para tersangka. Adapun tersangka kasus narkotika yang berhasil ditangkap BNNP Sumatera Barat di tahun 2023 sebanyak 22 orang pelaku.

Untuk jenis modus operandi yang diungkap BNNP Sumatera Barat, antara lain kasus penyelundupan narkotika jenis Shabu dan Ekstasi lintas provinsi yaitu dari Provinsi Riau menuju Provinsi Sumatera Barat, tersangka menggunakan modus dengan mengirim narkotika jenis sabu dan Esktasi dengan mobil pribadi yang mana pengendali menyuruh kurir merental mobil dan menjemput narkotika jenis Shabu dan Ekstasi ke Provinsi Riau yang mana kurir di arahkan pengendali menggunakan handphone. Sebanyak 2 Paket Besar narkotika jenis sabu dengan berat 1.997,52 Gram dan 6 paket besar diduga narkotika jenis Ekstasi warna pink yang dibungkus

dengan plastik bening dengan jumlah 6.000 butir berhasil diungkap oleh Bidang Pemberantasan BNNP Sumatera Barat.

Di samping itu tahun 2023 BNN Provinsi Sumatera Barat berhasil memetakan sebanyak 3 jaringan sindikat narkoba yang telah berhasil diungkap. Sebanyak 3 jaringan tersebut terdiri dari jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali dan bandar jaringan Riau-Sumbar di 2 Lembaga Pemasarakatan berbeda dengan jumlah 2 Orang Napi.

Pelaksanaan layanan Assesmen Terpadu pada tahun 2023 sebanyak **46 orang** tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dengan target awal 18 orang tersangka

BAB III

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

BNN Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana Kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi beserta 4 (empat) jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan BNN Kota Payakumbuh, BNN Kota Sawahlunto, BNN Kab. Solok dan BNN Kab. Pasaman Barat dan usulan dari bagian/bidang di BNN Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja Tahun 2024 berisikan :

- Target kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat adalah akumulasi target seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat
- Pendanaan pada rencana kerja merupakan akumulasi pendanaan seluruh unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat
- Rencana kerja dan pendanaan telah mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Barat
- Rencana kerja dan pendanaan BNN Provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

Rencana kerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 membutuhkan masukan (input) berupa pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan perincian berdasarkan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN Provinsi Sumatera Barat, uraian kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada table Kebutuhan Pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat dan jajaran Tahun 2024.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Pencapaian target kinerja mengidentifikasi sejauhmana kemampuan satker dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan

Renstra satker, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 yang ditetapkan secara menyeluruh dan terpadu memberikan kesatuan pandangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, terdiri dari :

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
3. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba
5. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
6. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
7. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
8. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba
10. Kegiatan Pengelolaan Informasi Edukasi

Program Dukungan Manajemen

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
2. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya
3. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN
4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
5. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan

Adapun kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran untuk tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Kebutuhan Pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat dan Jajaran Tahun 2024

No.	Kode Output	Kegiatan	2024					Total Kebutuhan Pendanaan
			BNNP Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	BNN Kota Sawahlunto	BNN Kabupaten Solok	BNN Kabupaten Pasaman Barat	
1	5936	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	183.000.000	77.000.000	74.000.000	77.000.000	74.000.000	485.000.000
2	3247	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	116.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	534.000.000
3	3257	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	259.002.000	189.470.000	189.470.000	189.470.000	189.470.000	1.016.882.000
4	3248	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	72.600.000	-	-	-	-	72.600.000
5	3259	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	16.885.000	14.485.000	14.485.000	14.485.000	14.485.000	70.115.000
6	3260	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	210.321.000	118.388.000	98.179.000	112.656.000	134.680.000	674.224.000
7	3256	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	34.770.000	9.685.000	6.745.000	9.685.000	12.840.000	73.725.000

8	3251	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	50.000.000	-	-	-		50.000.000
9	5354	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	350.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	490.000.000
10	3258	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	158.715.000	19.625.000	7.850.000	-	19.625.000	205.815.000
12	3236	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	5.136.074.000	89.610.000	87.830.000	87.462.000	90.870.000	5.491.846.000
13	3237	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	27.400.000	10.840.000	10.840.000	10.840.000	10.340.000	70.260.000
14	3238	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	14.207.000	12.619.000	12.559.000	12.529.000	12.769.000	64.683.000
15	3239	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	2.374.201.000	1.190.565.000	1.232.282.000	1.038.802.000	1.034.971.000	6.870.821.000
16	3979	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000
			9.023.175.000	1.883.287.000	1.885.240.000	1.703.929.000	1.745.050.000	16.240.681.000

Matriks Rencana Kerja BNN Provinsi Sumatera Barat

Unit Kerja : BNN Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota	Rp. 485.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/kota	Rp. 534.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	4 Kab/kota	Rp. 1.016.882.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya"	1 Kawasan	Rp. 72.600.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		narkoba secara berkelanjutan	menjadi "Waspada"		
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3,55 Indeks	-
5.	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	Rp 73.725.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp 70.115.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	2 Orang	-
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	Rp 674.224.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	10 Unit	-
		Meningkatnya kualitas Layanan rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik	3,06 Indeks	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		narkotika	rehabilitasi BNNP		
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas	Rp 490.000.000
	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi				Rp 50.000.000
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 %	Rp 205.815.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 %	-
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	95 %	Rp 64.683.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	4 Kabupaten/ Kota	-
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,23 Indeks	Rp. 5.491.846.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/ kota	-
12.		Meningkatnya Pengelolaan reformasi	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan	75 Indeks	

Rencana Kerja BNN Provinsi Sumatera Barat 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		birokrasi unit kerja vertikal	Penilaian Internal		

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Sumatera Barat tahun 2020- 2024. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kerja ini menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian di kemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Rencana kerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf BNN Provinsi Sumatera Barat. Sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja BNN Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dioperasikan membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasana pendanaan. Dari aspek pendanaan jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp **12.557.610.000,-**.